

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada September 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,60. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sukamara sebesar 1,98 persen dengan IHK sebesar 107,19 dan terendah di Kabupaten Kapuas sebesar 1,24 persen dengan IHK sebesar 105,84. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,31 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,88 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,65 persen; kelompok transportasi sebesar 0,54 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,45 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,21 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,63 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,12 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,52 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan di Kalimantan Tengah utamanya dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan strategi dari hulu ke hilir serta kelemahan pada aspek kelembagaan. Selain itu, aspek cuaca yang tidak menentu (perubahan cuaca) akan mempengaruhi produktifitas tanaman pangan Padi, serta optimalisasi penggunaan benih varietas unggul, pupuk, sarpras dan teknologi (hulu), penguatan pengolahan, distribusi dan pemasaran melalui pembentukan BUMD Pangan, optimalisasi RMU dan pembinaan usaha tani (hilir)

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan sidak pasar/distributor/pedagang besar secara berkala. Pemantauan harga komoditas khususnya minyak goreng dan gula pasir oleh Satgas Pangan dan TPID Prov Kalteng di pasar tradisional, pasar modern, dan distributor masih terus dilakukan. Mendekati HBKN sidak pasar dilakukan oleh tim satgas pangan Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain, kota Palangka Raya, kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.

TPID Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 - 24 Februari 2024 melaksanakan Capacity Building Tata Kelola Pengembangan Peternakan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian melakukan Capacity Building dan kunjungan lapangan ke peternakan ayam dan sapi di PT. Jatinom Indah - Blitar. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan MoU/Kontrak SID Optimalisasi Lahan dengan pihak Universitas Brawijaya - Malang.

Pada tanggal 19 - 21 Juni Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Capacity Building dan Penjajakan (KAD) dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusta) Pengendalian Inflasi tahun 2024 "penguatan Infrastruktur dan Teknologi Untuk Pengamanan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Menuju Ketahanan Pangan Nasional". Tim Sekretariat TPID Menghadiri Rapat

Koordinasi Pusat dan Daerah yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya - Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2024.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini antara lain : melakukan pembangunan pabrik pengolahan perberasan rice-to-rice dan rice milling plant di Kawasan Food Estate, mempercepat pembangunan dan operasi peternakan ayam terintegrasi sehingga meningkatkan produktivitas peternakan serta optimalisasikan organik, memastikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog terjaga dan pengawasan bersama Satgas Pangan untuk menghindari penimbunan. Penyerapan pasokan dari daerah lain (Subang Jawa Barat) untuk beras karau maupun pulen diiringi peluncuran beras merek Kalteng, Penanaman beras IR 42 sebagai substitusi beras karau, Penyerapan pasokan dari Probolinggo, Jawa Timur untuk bawang merah. Selain itu pengendalian El Nino dan La Nina yang dilakukan oleh pihak terkait melalui sistem irigasi tambahan, penggunaan benih unggul, mapping wilayah rawan terdampak perubahan cuaca dan membentuk Brigade DPI - OPT.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan yang dilakukan merupakan suatu upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna terciptanya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintahan Tingkat Provinsi guna percepatan penanganan terhadap kondisi /situasi pada masing-masing wilayah, sehingga para pihak pemangku kepentingan dan keputusan segera dapat menindaklanjuti segala situasi dan kondisi terkait pengendalian harga di Provinsi Kalimantan Tengah maupun pelaksanaan lainnya.

Kebijakan pengendalian harga beras melalui pelaksanaan KAD Beras karakteristik karau dengan Jawa Barat dan juga penanaman IR-42 pada tahun 2023. Berkat upaya stabilisasi harga yang telah dilakukan, inflasi komoditas beras terus menunjukkan tren andil inflasi yang menurun sejak Juni 2023. Pada tahun 2024, upaya hilirisasi beras diperkirakan dapat membantu pengendalian harga lebih lanjut Sinergi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia serta bekerjasama dengan pihak-pihak seperti BULOG dan instansi/lembaga terkait sangat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat terhadap harga dan pemenuhan kebutuhan di Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sinergi TPIP - TPID Provinsi dan Kab/Kota dalam program GNPIP.

Sinergi TPIP - TPID dan Kab/kota dalam program GNIP perlu terus dijaga dan diperkuat untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan baik secara internal maupun eksternal. Pemerintah daerah agar dapat mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa pasokan beras dan bahan pangan di Kalimantan Tengah relatif aman. Terus dilakukan inspeksi harga di pasar, juga Pelaksanaan Pasar Penyeimbang dan pasar murah di berbagai kota kota Inflasi maupun

luar sampel inflasi untuk komoditas volatile food. Antisipasi perubahan iklim untuk menjaga produksi pangan secara internal melalui pengendalian dampak cuaca terhadap kinerja pertanian di Kalimantan Tengah melalui pemantauan percepatan masa tanam dan hama penyakit, serta penyaluran sarana penunjang produktivitas pertanian. Selain itu, diperlukan komunikasi dalam menjaga ekspektasi inflasi dan afirmasi komitmen sinergi pengendalian inflasi. Perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan atau instansi terkait agar tiket pesawat, kapal dan angkutan darat, agar kenaikan tarif dapat

diantisipasi, sehingga naiknya tidak berlebihan.